

PENILAIAN *LIKELIHOOD* RISIKO *FRAUD* DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH

Mustofa Kamal

Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP

Email: kamalopek@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the likelihood level of fraud risk in the planning, organizing, actuating, controlling (POAC) aspects of government agencies and gives an example of fraud risk ranking list. Qualitative research method used with survey technique to 83 respondents of training participants in education center and supervision training of BPKP. Respondents rated likelihood on fraud risk in the POAC aspect. The results show that 8 fraud risks in POA with likelihood levels are frequent/often occurring and 31 fraud risks in POAC with likelihood levels have occurred. This suggests there is an increase in the likelihood of POA fraud risk, often occurring, from previous studies (BPKP, 2004), have occurred.

Kata Kunci: *risk fraud, likelihood*

PENDAHULUAN

Risiko merupakan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah (PP 60/2008). Risiko fraud adalah tingkat kerentanan yang dihadapi organisasi/entitas terkait dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam segitiga *fraud* yaitu motif/niat, kesempatan dan rasionalisasi melakukan perbuatan *fraud*, yang jika menjadi insiden akan berdampak pada kerugian keuangan, kinerja dan reputasi organisasi/entitas baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurharyanto, 2016).

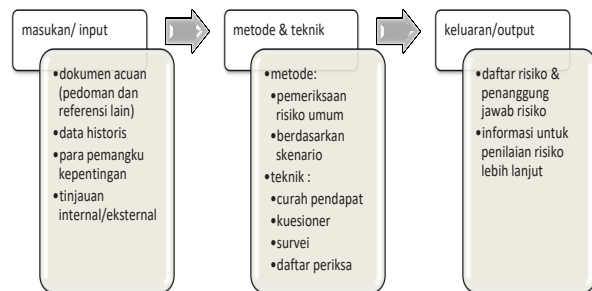
Organisasi dapat mengembangkan proses identifikasi risiko dengan menggunakan kombinasi dari survei internal, wawancara dengan berbagai karyawan dan asistensi dari konsultan (Bugall, Kallman, & Narvaez, 2015). Organisasi

juga dapat menggunakan 2 cara untuk identifikasi risiko yaitu dengan cara prospektif dan cara retrospektif.

Risiko prospektif adalah identifikasi risiko yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi beberapa waktu yang akan datang (Nurharyanto, 2010). Cara ini memerlukan pemikiran yang imajinatif dan pengalaman yang tepat (AS/NZS 4360:2004). Identifikasi risiko prospektif dapat dilakukan dengan metode antara lain survei staf atau klien untuk identifikasi isu atau problem yang diantisipasi (Nurharyanto dan Mirza, 2009). Proses identifikasi risiko dapat disusun dengan skema dalam Gambar 1.

Kemungkinan deteksi *fraud* dipengaruhi oleh efektivitas deteksi *fraud* melalui *on going monitoring activity* dan *whistle blowing*, efektivitas deteksi *fraud* oleh auditor internal

dan eksternal, efektivitas investigasi dan penuntutan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, efektivitas pengadilan kasus korupsi, serta efektivitas sanksi bagi koruptor (Kastowo, 2016). Kemungkinan keterjadian risiko *fraud* dapat diukur dengan menggunakan skala likert (Nurharyanto dan Mirza, 2009).



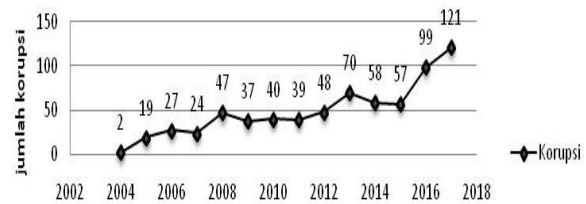
Sumber: diolah dari Nurharyanto dan Mirza, 2009, dan LKPP, 2016

Gambar 1. Skema Proses Identifikasi Risiko

Pada tahun 2004, Puslitbang BPKP melakukan penelitian tentang “Etika dan Kewaspadaan terhadap Fraud dalam Pemerintahan” melalui teknik survei dengan responden 246 para pejabat pada unit-unit pemerintah daerah, 36 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan 7 media massa/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *fraud* di pemda berhasil diidentifikasi di aspek POAC dan dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas terjadinya (*likelihood*), nilai-nilai yang dianut, serta kepedulian responden terhadap kejadian *fraud*. Secara umum responden mengakui bahwa *fraud* “pernah terjadi” pada keempat aspek POAC pemerintah daerah dengan intensitas yang cukup tinggi berupa “meninggikan anggaran dalam pengajuan/- usulan kegiatan” dan “menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi” (Puslitbang BPKP, 2004).

Di sisi lain, Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama 11 tahun (2004 ke 2014) menunjukkan peningkatan yang belum signifikan yaitu hanya meningkat 1,4 dari angka 2 menjadi 3,4 (TI, 2014). Hasil ini diperkuat dengan tren peningkatan atas 688 kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2004-2017

(Gambar 2).



Sumber: KPK, 2018; diolah

Gambar 2. Tren Jumlah Korupsi yang Ditangani KPK

Kondisi diatas menunjukkan fenomena bahwa *likelihood* atau tingkat keterjadian risiko *fraud* bukan lagi di level “pernah terjadi” seperti hasil penelitian BPKP tahun 2004 tapi cenderung meningkat. Sehingga muncul pertanyaan penelitian; bagaimana level *likelihood* risiko *fraud* tahun 2018? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui penelitian tentang *likelihood* risiko *fraud* di aspek POAC. Sementara itu, ada mandatori penilaian risiko (termasuk risiko *fraud*) di instansi pemerintah (PP 60/2008) namun belum banyak yang melakukannya. Bahkan penelitian di bidang manajemen risiko sektor pemerintahan juga masih sedikit.

TUJUAN PENELITIAN

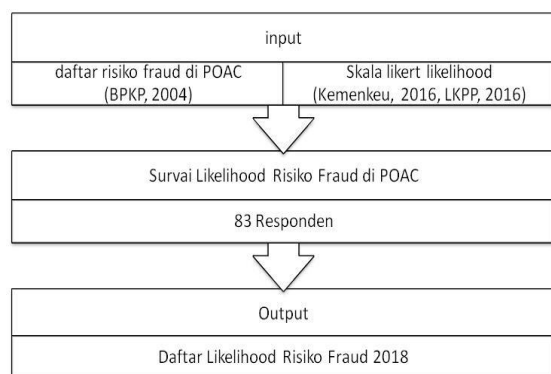
Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potret terkini, 2018, level *likelihood* risiko *fraud* di aspek POAC instansi pemerintah dan memberi contoh daftar peringkat risiko *fraud* (*fraud risk register*) yang dapat dikembangkan sebagai daftar risiko di instansi pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2015). Teknik yang digunakan

adalah survei (LKPP, 2016) dengan responden 83 peserta diklat di Pusdiklatwas BPKP.

Responden diminta untuk menilai kemungkinan terjadinya (*likelihood*) risiko *fraud*. Sumber data daftar risiko *fraud* berupa hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BPKP tahun 2004. Kemungkinan terjadinya risiko *fraud* akan diukur dengan menggunakan skala likert 1 - 5 (Kemenkeu, 2016, dan LKPP, 2016), dengan makna skor 1 berarti hampir tidak pernah terjadi, 2 berarti pernah terjadi, 3 berarti sering terjadi, 4 berarti sangat sering terjadi, 5 berarti hampir pasti terjadi (LKPP, 2016). Proses penelitian digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Nurharyanto dan Mirza, 2009, dan LKPP, 2016

Gambar 3. Proses Penelitian *Likelihood* Risiko *Fraud*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Delapan puluh tiga responden merupakan peserta diklat dari 3 diklat yang berbeda, terdiri dari; 34 peserta diklat jabatan fungsional auditor (JFA) Ahli di Lingkungan APIP, 27 peserta diklat substansi manajemen risiko sektor publik di lingkungan pegawai Kemenaker dan 22 peserta diklat JFA Muda di lingkungan Kemenpupera (Tabel 1).

Tabel 1. Rincian Data Responden

No.	Peserta pada diklat	Jabatan	Jumlah (orang)	
			populasi	Yang mengisi survei
1	JFA ahli dari berbagai APIP	Calon auditor auditor	32	1

2	Manajemen Risiko di Kemenaker	pelaksana Struktural; eselon IV	1	34
		Sub jumlah	34	
3	JFA muda dari Kemenpupera	Calon auditor pertama	3	27
		Auditor muda	7	
		Auditor madya	1	
		Auditor Struktural; eselon IV	4	
	Jumlah	Struktural; eselon III	16	83
		Sub jumlah	2	
		Auditor pertama	33	
		Auditor Pertama	22	

Sumber: data diolah, 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas level *likelihood* risiko *fraud* cenderung meningkat. Rinciannya sebagai berikut:

1. *Fraud Risk in Planning Likelihood*

Ada 13 risiko *fraud* dalam perencanaan dengan hasil survei *likelihood* dan peringkat risikonya sebagai berikut:

Tabel 2. *Likelihood of Fraud Risk in Planning*

No.	Uraian <i>Fraud Risk in Planning</i>	Skala <i>Likelihood</i>	Kode
1	Meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan	2,77	FRP 1
2	Membuat kebijakan yang cenderung hanya menguntungkan pihak tertentu	2,22	FRP 2
3	Meminta fasilitas "konsumsi" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	2,11	FRP 3
4	Meminta fasilitas "oleh-oleh/cinderamata/buah tangan" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	2,04	FRP 4
5	Arisan tender untuk proyek-proyek pembangunan	1,99	FRP 5
6	Membuat prosedur yang cenderung hanya menguntungkan pihak tertentu	1,96	FRP 6
7	Meminta fasilitas "tempat pembahasan" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	1,93	FRP 7
8	meminta imbalan tertentu dalam menentukan kebijakan/keputusan	1,88	FRP 8
9	Meminta fasilitas "penginapan" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	1,84	FRP 9
10	Meminta fasilitas "uang saku/transport" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	1,83	FRP 10
11	Meminta fasilitas "hiburan" dari pihak tertentu saat penyusunan maupun pembahasan kebijakan	1,82	FRP 11

12	Pejabat yang terlibat dalam pengesahan anggaran meminta imbalan tertentu	1,82	FRP 12
13	Membocorkan rencana kegiatan yang bersifat rahasia dengan memperoleh imbalan tertentu	1,58	FRP 13

Sumber: data diolah, 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa level *likelihood* risiko *fraud* di aspek *planning* yang tertinggi ada di risiko *fraud* berupa “meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan” dengan skor rata-rata skala 2,77 atau sering terjadi. Hasil ini lebih tinggi dibanding dengan hasil penelitian Puslitbang BPKP (2004) yang mengungkapkan bahwa *likelihood* FRP 1 dalam skala “pernah terjadi”.

2. *Fraud Risk in Organizing Likelihood*

Terdapat 8 risiko *fraud* dalam pengorganisasian dengan hasil survei *likelihood* dan peringkat risikonya sebagai berikut.

Tabel 3. *Likelihood of Fraud Risk in Organizing*

No	Uraian <i>Fraud Risk in Organizing</i>	Skala Likelihood	Kode
1	Meloloskan permintaan penempatan/mutasi pegawai tertentu walaupun tidak sesuai kriteria	2,58	FRO 1
2	Meloloskan calon pegawai tertentu (walaupun tidak memenuhi kualifikasi) dalam penerimaan pegawai	2,19	FRO 2
3	Pejabat berwenang meminta imbalan/hadiah dalam hal “menduduki jabatan tertentu”	1,98	FRO 3
4	Memperlambat pelayanan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu	1,97	FRO 4
5	sering diminta memberikan imbalan tertentu dalam penentuan formasi eselon suatu organisasi	1,88	FRO 5
6	sering diminta memberikan imbalan tertentu dalam negosiasi kelangsungan hidup organisasi	1,86	FRO 6
7	Pejabat berwenang meminta imbalan/hadiah dalam hal “kenaikan pangkat”	1,76	FRO 7
8	pejabat yang berwenang dalam memberikan penugasan sering meminta imbalan	1,67	FRO 8

Sumber: data diolah, 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa dari delapan risiko *fraud* di aspek *organizing* yang tertinggi ada di risiko *fraud* berupa “meloloskan permintaan penempatan/mutasi pegawai ter-

tentu walau tidak sesuai kriteria” dengan rata-rata skor skala 2,58 atau sering terjadi (tabel 3). Hasil ini lebih tinggi dari hasil penelitian Puslitbang BPKP (2004) yang mengungkapkan bahwa *likelihood* FRO 1 dalam skala “pernah terjadi”

3. *Fraud Risk in Actuating Likelihood*

Ada 8 risiko *fraud* dalam pelaksanaan (*actuating*) dengan hasil survei *likelihood* dan peringkat risikonya sebagai berikut.

Tabel 4. *Likelihood of Fraud Risk in Actuating*

No.	Uraian <i>Fraud risk in Actuating</i>	Skala Likelihood	kode
1	Menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi	2,80	FRA 1
2	Menerima komisi/premi untuk kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa	2,23	FRA 2
3	Menerima imbalan tertentu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan	2,15	FRA 3
4	Memalsukan berkas/ dokumen/tandatangan/kuitansi	1,97	FRA 4
5	Melakukan transaksi/kegiatan/proyek fiktif	1,69	FRA 5
6	Memberi imbalan tertentu untuk bisa mendapatkan penghargaan	1,57	FRA 6
7	Memberi imbalan tertentu untuk bisa mengikuti pendidikan dinas	1,51	FRA 7
8	Menjual barang milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi	1,29	FRA 8

Sumber: data diolah, 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa dari delapan risiko *fraud* aspek *actuating* yang tertinggi ada di risiko *fraud* berupa “menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi” dengan skor rata-rata skala 2,8 atau sering terjadi. Hasil ini lebih tinggi dari hasil penelitian Puslitbang BPKP (2004) yang mengungkapkan bahwa *likelihood* FRA 1 dalam skala “pernah terjadi”.

4. *Fraud Risk in Controlling Likelihood*

Ada 11 risiko *fraud* dalam *controlling* dengan hasil survei *likelihood* dan peringkat risikonya sebagai berikut.

Tabel 5. *Likelihood of Fraud Risk in Controlling*

No.	Uraian Fraud Risk in Controlling	skala likelihood	Kode
1	Pemeriksa sering meminta berbagai fasilitas "Makan"	1,76	FRC 1
2	Pemeriksa sering meminta berbagai fasilitas "Transportasi"	1,74	FRC 2
3	Menyusun formasi tim audit yang menguntungkan penyusunnya secara pribadi	1,67	FRC 3
4	Manipulasi angka dalam laporan	1,65	FRC 4
5	Pemeriksa menghilangkan temuan audit dengan maksud "Melindungi manajemen obyek pemeriksaan"	1,58	FRC 5
6	Pemeriksa menghilangkan temuan audit dengan maksud "Melindungi korps obyek pemeriksaan"	1,54	FRC 6
7	Pemeriksa menghilangkan temuan audit dengan maksud "Ditukar dengan imbalan tertentu"	1,50	FRC 7
8	Membocorkan isi laporan yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi	1,49	FRC 8
9	Pemeriksa sering meminta berbagai fasilitas "Penginapan"	1,48	FRC 9
10	Pemeriksa sering meminta berbagai fasilitas "Hiburan"	1,48	FRC 10
11	Pemeriksa sering meminta berbagai fasilitas "Uang saku"	1,45	FRC 11

Sumber: data diolah, 2018

Hasil survei menunjukkan bahwa dari sebelas risiko *fraud* aspek *controlling*, *likelihood* yang tertinggi ada di risiko *fraud* berupa "pemeriksa sering meminta/menerima fasilitas dari audit berupa jamuan makan" dengan skor rata-rata skala 1,76 atau pernah terjadi (tabel 5). Hasil ini senada dengan hasil penelitian Puslitbang BPKP (2004) yang mengungkapkan bahwa *likelihood* FRC 1 dalam skala "pernah terjadi". Secara keseluruhan daftar risiko *fraud* di aspek POAC dapat dibuat dengan peringkat sesuai level *likelihood*nya sebagai berikut.

Tabel 6. Daftar peringkat risiko *fraud* di POAC

No.	POAC	Risiko <i>fraud</i>		Uraian likelihood
		Kode (skor)	Σ	
1	Planning	FRP 1 (2,77), FRP 2 (2,22), FRP 3 (2,11), FRP 4 (2,04)	4	Sering terjadi (diatas 2)
	Organizing	FRO 1 (2,58), FRO 2 (2,19), FRA 1 (2,80), FRA 2 (2,23), FRA 3 (2,15)	2	
	Actuating	Sub jumlah	2	
			8	
	Planning	FRP 5 (1,99), FRP 6 (1,96), FRP 7 (1,93), FRP 8 (1,88), FRP 9 (1,84), FRP 10 (1,83), FRP 11 (1,82), FRP 12 (1,82), FRP 13 (1,58)	9	
2	Organizing	FRO 3 (1,98), FRO 4 (1,97), FRO 5 (1,88), FRO 6 (1,86), FRO 7 (1,76), FRO 8 (1,67), FRA 4 (1,97), FRA 5 (1,69), FRA 6 (1,57), FRA 7 (1,57), FRA 8 (1,51)	6	Pernah terjadi (diatas 1 sd 2)
	Actuating	FRC 1 (1,76), FRC 2 (1,74),	5	
	Controlling		11	

FRC 3(1,67), FRC 4(1,65),
FRC 5(1,58), FRC 6(1,54),
FRC 7(1,50), FRC 8(1,49),
FRC9(1,48), FRC 10(1,48),
FRC 11(1,45)

Sub jumlah 31

Sumber: data diolah, 2018

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa daftar risiko *fraud* di POAC instansi pemerintah dapat dibuat dengan 2 level *likelihood*nya. Delapan risiko *fraud* di POA dengan level *likelihood* "sering terjadi" dan 31 risiko *fraud* di POAC dengan level *likelihood* "pernah terjadi". Level *likelihood* risiko *fraud* yang tertinggi, level "sering terjadi", berturut-turut berupa; "meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan", "meloloskan permintaan penempatan/mutasi pegawai tertentu walau tidak sesuai kriteria", dan "menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi". Hal ini berbeda dan menunjukkan ada peningkatan *likelihood* jika dibanding dengan hasil penelitian puslitbang BPKP (2004) yang menunjukkan *likelihood* ketiga risiko tersebut ada di level "pernah terjadi".

Hasil penelitian ini memberi informasi bahwa peningkatan level *likelihood* risiko *fraud* di aspek *planning*, *organizing* dan *actuating* antara tahun 2004 dan tahun 2018 seiring dengan tren peningkatan kasus tipikor dari tahun 2004 sampai dengan 2017 (KPK, 2018). Implikasinya, hasil ini dapat dipertimbangkan oleh instansi pemerintah dalam proses membangun/mendesain manajemen risiko di instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Puslitbang BPKP, *Etika dan Kewaspadaan Terhadap Fraud dalam Pemerintahan; Suatu Upaya Membangun Etika untuk Mencegah*

- Fraud pada Pemerintah Daerah*, Laporan Hasil Penelitian Puslitbang BPKP, Jakarta, 2004
- Bugall, Kallman, Narvaez, *When you come to a fork in the road, take it*, The Journal of Enterprise Risk Management, Volume 1, issue 1, 2015, Diakses dari <https://thegrbluebook.com/wp-content/uploads/2015/03/Journal-of-Enterprise-Risk-Management.pdf> pada 13 Februari 2018
- Nurharyanto, *Konsep dan Implementasi Risk Assessment*, Modul Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dasar, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2010
- Nurharyanto dan Mirza Safari, *Penilaian Risiko*, Modul 3, Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dasar, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2009
- Tim penyusun materi SKKNI, *Mengelola Risiko*, Unit Kompetensi 29, materi SKKNI 2016, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Deputy Pengembangan Pembinaan SDM, LKPP, Jakarta, 2016
- Handbook Risk Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004, diakses dari https://www.inxsoftware.com/media/transfer/doc/hb_436_2004_guidelines_to_as_nzs_4360_2004_risk_management_guidelines_companion_to_as_nzs_4360_2004.pdf, tanggal 12 Februari 2018
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, diakses dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf, pada 1 Maret 2018
- World Economic Forum, 2015, *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, Geneva
- <http://www.transparency.org>
- <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi>
- Nurharyanto, *Pendekatan Teori Permainan dan Konsep Assesmen Risiko Fraud Untuk Melakukan Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pada Sektor Publik*, Karya Tulis Ilmiah, Majalah Kampus Pengawasan: Media Komunikasi Diklat Auditor, Edisi Januari 2016, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2016
- Kastowo Marno, *Pemodelan Tindakan Koruptif: Analisis dengan pendekatan Teori Pilihan Rasional dan Dilema Keagenan*, Karya Tulis Ilmiah, Majalah Kampus Pengawasan: Media Komunikasi Diklat Auditor, Edisi Januari 2016, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peserta diklat JFA Ahli (34 orang), *Survei Risiko Fraud di Planning Actuating Organizing Controlling (POAC)*, Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Ahli Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Hotel New Ayuda, Mega Mendung Bogor, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2018
- Peserta diklat MR (27 orang), *Survei Risiko Fraud di Planning Actuating Organizing Controlling (POAC)*, Diklat Substansi Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik bagi Pegawai Kemenaker di Pusdiklat Kemenaker Jakarta Timur, Pusdiklatwas BPKP, Jakarta, 2018
- Peserta diklat JFA Muda (22 orang), *Survei Risiko Fraud di Planning Actuating Organizing Controlling (POAC)*, Diklat JFA Muda di Lingkungan Kemenpupera di Hotel Puri Ayuda, Mega mendung Bogor, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2018
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan
- <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>